

**PERUBAHAN KEBIJAKAN SEKTOR KETAHANAN PANGAN ORGANISASI
INTERNASIONAL D-8**

(Skripsi)

Oleh

DAFFA MUHAMMAD

(2016071023)



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK
PERUBAHAN KEBIJAKAN SEKTOR KETAHANAN PANGAN
ORGANISASI INTERNASIONAL D-8

Oleh
DAFFA MUHAMMAD

Sebagai organisasi Internasional, D-8 (Developing-8) didirikan berdasarkan kesamaan permasalahan yang sama. Sejak tahun 2009 bidang pertanian menjadi salah satu fokus dalam agenda D-8. Akan tetapi adanya perubahan arah kebijakan atau fokus di bidang pertanian D-8 terjadi dalam rangka mengantisipasi perubahan arah pertanian secara global terutama kebijakan yang disepakati dalam lembaga FAO serta mengadaptasi adanya pertumbuhan teknologi dibidang pertanian menjadi pertanyaan mengapa perubahan tersebut dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan organisasi internasional D-8 (Organisasi Kerjasama Delapan), dan Mendeskripsikan kebijakan ketahanan pangan dan perubahan kebijakan Ketahanan Pangan D-8.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan staff biro Kerjasama Luar Negeri terkait ketahanan pangan, dan sumber sekunder berupa dokumen resmi berupa laporan rapat, sidang, deklarasi dan dokumen informatif lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari website organisasi internasional D-8 maupun sumber elektronik lainnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik Huberman dan Miles, dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori konsep antara lain perubahan kebijakan, organisasi internasional, dan ketahanan pangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kebijakan D-8 bila ditinjau melalui agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi, dan revisi, dimana pada awalnya fokus D-8 di bidang pertanian terkait dengan bank benih. Namun, pada tahun 2022 D-8 bergeser fokus pada CSA (*Climate Smart Agriculture*), hal tersebut dikarenakan dampak Covid-19, dan kekhawatiran mendalam dari negara anggota, terutama yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Kata Kunci : D-8, Perubahan Kebijakan, Organisasi Internasional, CSA

ABSTRACT
POLICY CHANGES IN THE FOOD SECURITY SECTOR OF THE D-8
INTERNATIONAL ORGANIZATION

By
DAFFA MUHAMMAD

As an international organization, the D-8 (Developing-8) was established based on common concerns. Since 2009, agriculture has been one of the focuses of the D-8 agenda. However, the change in policy direction or focus in the field of D-8 agriculture occurred in order to anticipate changes in the direction of agriculture globally, especially the policies agreed upon in the FAO institution. This research aims to describe the international organization D-8, and describe food security policies and changes in D-8 Food Security policies. This research uses a descriptive qualitative approach, using primary data in the form of interviews with staff of the Foreign Cooperation bureau related to food security, and secondary sources in the form of official documents in the form of meeting reports, sessions, declarations and other informative documents relevant to this research originating from the D-8 international organization website and other electronic sources. The data analysis technique used in this research uses the Huberman and Miles technique. Researchers used theoretical concepts including policy change, international organizations, and food security. The results of this study show that there are changes in D-8 policy when viewed through agenda setting, formulation, adoption, implementation, evaluation, and revision, where initially the focus of the D-8 in agriculture was related to seed banks. However, in 2022 the D-8 shifted its focus to CSA (Climate Smart Agriculture), this was due to the impact of Covid-19, and the deep concerns of member countries, especially those vulnerable to the negative impacts of climate change.

Keywords: D-8, Policy Change, International Organization, CSA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN SEKTOR KETAHANAN PANGAN ORGANISASI
INTERNASIONAL D-8**

Oleh

DAFFA MUHAMMAD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi

**PERUBAHAN KEBIJAKAN SEKTOR
KETAHANAN PANGAN ORGANISASI
INTERNASIONAL D-8**

Nama Mahasiswa

Daffa Muhammad

Nomor Pokok Mahasiswa

2016071023

Jurusan

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 197912302014041001

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

NIP. 199212192022031011

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.

NIP. 1981062820050111003

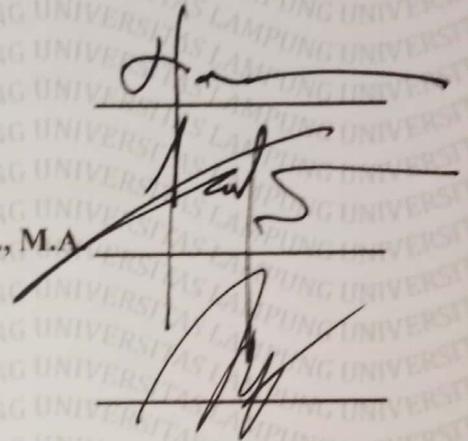
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

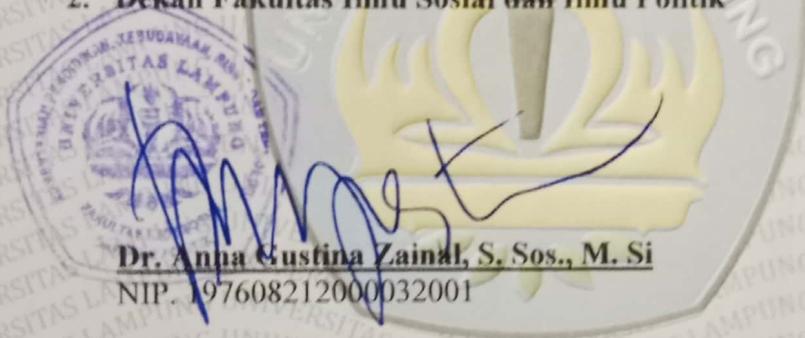
Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Moh. Nizar, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Daffa Muhammad
Npm. 2016071023

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Daffa Muhammad lahir di kota Jakarta pada tanggal 16 Juli 2002 yang merupakan anak dari pasangan bapak Andhi Novayadi dan ibu Pepi Nur Susilawati. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Khairunnas, Sekolah Dasar Swasta Khairunnas, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Serang, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ciruas. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur reguler (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan akademik, seperti penelitian bersama dosen HI Unila pada proyek riset Potensi Ekspor Sarang Burung Walet Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung sebagai Legislator Muda Komisi III tahun 2020-2021, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ-HI) sebagai anggota Divisi External Relations Business Development (ERBD) tahun 2021-2022, serta menjadi perwakilan Universitas Lampung pada acara Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia ke XXXV. Peneliti juga mendapat beberapa pencapaian diluar perkuliahan seperti mendapatkan juara pada perlombaan E-sport Honor of Kings dan League of Legends.

MOTTO

“Terangnya cahaya matahari menimbulkan bayangan, dan gelapnya malam memiliki bintang.”

(Sakata Gintoki)

“Meskipun bumi berbalik mengitari bulan, itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanku.”

(Sherlock Holmes)

“Experience is the teacher of all things.”

(Julius Caesar)

SANWACANA

Puja dan puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah, serta izin-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Kebijakan Sektor Ketahanan Pangan Organisasi Internasional D-8”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, dan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak bantuan, doa, dukungan, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada: Ibu Dr. Ana Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

1. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
2. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022.
3. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bantuan, serta dukungan selama perkuliahan.
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa selama ini memberikan masukan, motivasi, arahan skripsi, serta konsisten dalam membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terima kasih banyak atas ilmu, waktu, serta kesabaran abang dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini, semoga abang sekeluarga sehat selalu.
5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan penulis. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, bimbingan, semoga mas Indra sekeluarga sehat, dan lancar selalu urusannya.
6. Mas Moh. Nizar, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan arahan, wawasan baru, nasihat, dan motivasi agar skripsi penulis lebih baik dan bermanfaat ke depannya.
7. Seluruh dosen, dan staf Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga

penulisan skripsi.

8. Kepada mamah aku Pepi yang telah sabar dan selalu memaafkan semua kebodohanku, terima kasih telah mendidikku hingga aku bisa kuliah, terima kasih telah bekerja keras dan tidak menyerah kepadaku, terima kasih telah merawatku hingga saat ini, aku bersyukur dan bangga punya mamah, terima kasih mamah atas semuanya, aku sayang mamah.
9. Kepada ayah aku Andhi yang selalu memberiku nasihat agar menjadi pribadi yang baik dan dengan sabar memaafkanku, terima kasih telah menjadi sosok ayah yang baik buatku, mencukupi semua kebutuhanku, bekerja keras dan tidak mengenal lelah. Terima kasih atas semua yang telah engkau perjuangkan buatku, aku sayang ayah.
10. Kepada adik-adikku Azcka dan Hadiya yang telah memberikan kehangatan dalam hidupku, terima kasih atas semuanya, aku sayang kalian.
11. Terima kasih untuk Dika yang selalu ada buat saya dikala senang maupun susah, terima kasih atas bantuan yang sering kau berikan.
12. Terima kasih kepada teman-teman “Wisma Timur” yang terdiri dari Ahmad Izzul Haqie, Aji Mahesa, Agung Darmadji, dan Rizki Fadillah yang telah menemani keseharian saya selama penyusunan skripsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Konseptual.....	17
2.2.1 Perubahan Kebijakan.....	17
2.2.2 Organisasi Internasional.....	21
2.2.3 Ketahanan Pangan.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisa Data.....	29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Organisasi Internasional D-8 (Organisasi Kerjasama Pembangunan Delapan	31
4.2 Penerapan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8.....	36
4.3 Analisis Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8	42
4.3.1 <i>Roadmap Agenda Setting Ketahanan Pangan D-8</i>	43
4.3.2 Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8	47
4.3.3 Adopsi Sebagai Proses Pengesahan Kebijakan	50
4.3.4 Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan D-8.....	53
4.3.5 Penilaian Pertimbangan dan Evaluasi Kebijakan D-8	56
4.3.6 Perbaikan dan Revisi Kebijakan D-8	58
4.4 Perspektif Keberhasilan Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 pada Negara Anggota	69
4.4.1 Turki	72
4.4.2 Malaysia	73
4.4.3 Indonesia	74
4.4.4 Mesir	75
4.4.5 Pakistan	75
4.4.6 Bangladesh	76
4.4.7 Iran	77
4.4.8 Nigeria	78
V. SARAN DAN KESIMPULAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data dampak perubahan iklim terhadap negara D-8.....	9
Tabel 2. Perspektif FAO terhadap dampak perubahan iklim dan CSA	10
Tabel 3. Data Penelitian terdahulu	15
Tabel 4. Pelaksanaan KTT D-8	31
Tabel 5. Luas Lahan Pertanian Negara Anggota D-8 (dalam ribuan)	36
Tabel 6. Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	40
Tabel 7. Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	40
Tabel 8. Matriks Faktor Internal dan Eksternal dalam Ketahanan Pangan D-8 ...	44
Tabel 9. Agenda <i>Summit</i> D-8	51
Tabel 10. Implementasi Agenda D-8	62
Tabel 11. Proses Adopsi Kebijakan	54
Tabel 12. Disparitas Ketahanan Pangan Negara D-8	58
Tabel 13. Analisis SWOT terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan	66
Tabel 14. Bentuk Kebijakan dan Faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8	67
Tabel 15. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Turki	69
Tabel 16. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Malaysia	70
Tabel 17. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Indonesia	71
Tabel 18. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Mesir	72
Tabel 19. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Pakistan	73
Tabel 20. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Bangladesh	73
Tabel 21. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Iran	74
Tabel 22. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Nigeria	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkat penyumbang emisi GRK berdasarkan sektor (ribu ton)	7
Gambar 2. Luas lahan sektor pertanian negara D-8.....	8
Gambar 3. Policy Making and Policy Implementation.....	18
Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 5. Lewin's Force Field Theory of Change	42

DAFTAR SINGKATAN

1. CSA : Climate-Smart Agriculture
2. D-8 : Development-8
3. D8PFS : D8 Programme Food Security
4. FAO : Food and Agriculture Organization
5. IBRD : International Bank of Reconstruction Development
6. IGO : International Governmental Organization
6. KTT :Konferensi Tingkat Tinggi
7. OI : Organisasi Internasional
6. OKI : Organisasi Kerjasama Islam
7. PSCSA : Promoting and Scaling up Climate Smart Agriculture
8. SGD : Sustainable Development Goals
9. UKM : Usaha Kecil dan Menengah
11. WHO : World Health Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Organisasi D-8 (Developing-8) merupakan organisasi negara-negara berkembang yang terdiri dari negara Turki, Pakistan, Malaysia, Iran, Indonesia, Mesir, dan Bangladesh. Pada Oktober 1996, D-8 merupakan organisasi dengan perjanjian global sebagaimana komposisi negara anggotanya. Langkah awal dalam pembentukan D-8 dimulai ketika Prof. Dr. Necmettin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, mengundang perwakilan negara-negara anggota untuk menghadiri "Konferensi Kerjasama Pembangunan" di Istanbul (DOĞAN, 2019). Setelahnya pada tahun 1997 terjadi deklarasi Istanbul yang dimana menetapkan tujuan dan alasan pembentukan organisasi. Deklarasi pertama KTT D-8 di Istanbul pada 1997 menegaskan bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk memajukan pembangunan sosial-ekonomi dengan mengikuti prinsip-prinsip perdamaian, dialog, kerja sama, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi hidup (Istanbul Declaration, 1997). Ini mencakup upaya meningkatkan posisi ekonomi negara-negara anggota dalam skala global, menghadirkan keragaman dalam perdagangan, meningkatkan peran dalam pengambilan keputusan internasional, dan meningkatkan standar.

Tujuan D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam perekonomian global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya, D-8 menjadi forum global yang membahas berbagai isu, seperti perdagangan, industri, pembangunan pedesaan, pertanian dan ketahanan pangan, sains dan teknologi, serta pengurangan kemiskinan. D-8 menekankan peran penting komunitas bisnis dalam mempromosikan kerjasama di antara negara-negara berkembang. Pada pertemuan di Istanbul tanggal 15 Juni 1997, negara anggota mengakui bahwa setelah Perang Dingin dan dengan munculnya globalisasi ekonomi, negara-negara berkembang menghadapi peluang dan tantangan serta menyadari pentingnya kerjasama erat antara negara-negara berkembang untuk mencapai perdamaian global (Istanbul

Declaration, 1997). Mereka menyadari perlunya mengatasi kemiskinan, memperkuat kerangka makroekonomi yang stabil, dan menghilangkan hambatan perdagangan antara negara-negara mereka. Dalam rangka itu, mereka setuju untuk membentuk mekanisme kerjasama pembangunan yang disebut Developing-8 (D-8) dengan tujuan utama pembangunan sosial-ekonomi.

Perhatian D-8 terhadap perkembangan pertanian di negara anggota, diawali dengan adanya pertemuan pertama tingkat menteri pertanian D-8 pada 25-27 Februari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan ini dibahas secara mendalam pentingnya D-8 mendukung sektor pertanian, hal ini karena pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menyumbang PDRB sebesar 20-25% di masing-masing negara anggota (Kuala Lumpur Initiative, 2009). Pertemuan pertama membahas terkait pentingnya Bank Benih yang dilandasi adanya kekhawatiran kepunahan sumberdaya genetik tanaman akibat perubahan iklim, degradasi lahan, urbanisasi dan deforestasi. Kehilangan sumberdaya genetik tanaman akan menjadi ancaman terhadap hilangnya sifat-sifat penting tanaman seperti ketahanan terhadap faktor abiotik (kekeringan, banjir, degradasi lahan) dan faktor biotik seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit.

Perhatian D-8 pada bidang pertanian semakin intensif, pada pertemuan selanjutnya tahun 2011 di teheran Iran, membahas pentingnya ketahanan pangan. Hal ini dilandasi dengan semakin menipisnya cadangan pangan dunia akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, degradasi lahan, deforestasi serta adanya ancaman hama dan penyakit tanaman yang semakin meningkat (Tehran Initiative, 2011). Pertemuan kali ini menyoroti pentingnya sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan. Sehingga diperlukan suatu kerjasama yang konkrit diantara negara D-8. Namun demikian, mempersiapkan program untuk kelompok yang beragam secara geografis, bio-fisik dan sosio-ekonomi seperti D-8 tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya upaya kolektif dan terkoordinasi semua negara anggota. Oleh karena itu agenda tahun 2011 melahirkan berbagai kebijakan penting dalam upaya kolektif mendukung ketahanan dengan terbentuknya program D-8 untuk ketahanan pangan (D8 Programme Food Security/D8PFS). Program tersebut akan fokus pada peningkatan program ketahanan pangan nasional dan langkah-langkah negara-negara anggota D-8 untuk : a) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;

b) memperluas perdagangan komoditas pertanian di antara anggota D-8; c) meningkatkan pertukaran pengalaman dan pandangan mengenai kebijakan ketahanan pangan melalui penguatan kemampuan lembaga dan langkah-langkah lainnya; dan d) adanya pelibatan forum sektor swasta untuk mendukung mengidentifikasi atau memulai proyek kegiatan yang konkret.

Ketahanan pangan menurut konferensi pangan sedunia 1996 berupa “Ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke cukup makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat.” (FAO, 2008). Berdasarkan dari definisi tersebut, FAO (Food and Agriculture Organization) mengidentifikasi empat dimensi utama ketahanan pangan berupa, a) Ketersediaan Fisik Makanan: Terkait dengan produksi, persediaan, dan perdagangan makanan. b) Akses ekonomi dan fisik ke makanan: fokus pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga untuk memastikan akses yang memadai terhadap makanan. c) Pemanfaatan Makanan: Melibatkan cara tubuh memanfaatkan nutrisi dalam makanan melalui praktik perawatan, persiapan, keragaman diet, dan distribusi makanan di dalam rumah tangga. d) Stabilitas dari Tiga Dimensi Lain dari Waktu ke Waktu: Penting untuk menjaga stabilitas akses makanan secara periodik untuk mencegah penurunan kondisi gizi, terutama dalam menghadapi faktor-faktor seperti kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, dan masalah ekonomi.

Sektor pertanian dalam dukungannya dalam ketahanan pangan di negara anggota D-8 semakin menguat, saat terjadi Pandemi Covid-19 terbukti bahwa salah satu sektor yang bertahan dan mampu menopang inflasi di negara anggota D-8 adalah sektor pertanian. Pertemuan D-8 tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual dengan tema “Pengembangan industri pertanian berkelanjutan dan integrasi petani kecil dalam rantai nilai global” semakin memperkuat peran sektor pertanian dalam ketahanan pangan di grup D-8 (Sixth D-8 Ministerial Meeting on Agriculture and Food Security, 2020). Tujuan dari konferensi ini menegaskan perlunya meningkatkan hasil pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai melalui penelitian, inovasi, dan pengembangan pertanian bersama yang berorientasi pada produksi di negara-negara anggota D-8. Hasil dari konferensi tersebut berupa berdirinya Pusat Riset untuk Pertanian dan Keamanan Pangan D-8

yang berlokasi di Faisalabad, Pakistan, mempromosikan Agribisnis dan Rantai Nilai di negara-negara anggota D-8, pendirian Pusat Kontrak Pertanian (CFC) dalam rantai nilai global di Iran, mendorong perdagangan dan investasi di sektor pertanian melalui partisipasi dalam pameran, pameran perdagangan, dan forum investasi.

Pada tahun 2021 D-8 merilis roadmap untuk tahun 2020-2030, yang memuat sejumlah target yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SGD) (Kemenlu, 2021). Pada pertemuan para menteri pertanian anggota D-8 ke-7 tahun 2022 diusung tema tentang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bertajuk: “Promosi Pertanian Cerdas Iklim: Isu-Isu Utama bagi Negara-negara Anggota D-8.” Pandemi covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan ketahanan pangan dunia yang mengakibatkan mal nutrisi dan kekurangan pangan di banyak negara. Perubahan iklim yang terjadi sangat cepat akibat kerusakan bumi telah memacu penurunan pasokan pangan yang berasal dari sektor pertanian. Disisi lain bahwa teknologi telah berkembang dengan pesat, peluang perbaikan teknologi berbasis adaptasi dan mitigasi iklim semakin berkembang. Oleh karena itu tema Pertanian Cerdas Iklim sangat relevan dengan ketahanan pangan dimana saat ini sektor pertanian harus mengadopsi teknologi baru dan sistem transformasi pangan seperti Pertanian Cerdas Iklim, untuk menjadikan sistem pertanian pangan lebih tangguh, efisien, berkelanjutan, dan inklusif (Annex III - Statement by the Secretary General of D-8). Perubahan iklim disatu sisi dan kerawanan pangan disisi lainnya sebagai akibat dari perubahan iklim global. Oleh karena itu ketahanan pangan dimasa mendatang sangat tergantung pada adaptasi dan mitigasi terhadap iklim, salah satunya adalah dengan penerapan pertanian cerdas iklim untuk menunjang ketahanan pangan.

Berdasarkan hal ini penulis akan melakukan analisis bagaimana terjadinya proses perubahan kebijakan yang terjadi pada Pertemuan Menteri Pertanian D-8 tentang Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Februari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia hingga pertemuan yang diadakan di Bangladesh pada tahun 2022. Brinkerhoff menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya mencakup perubahan pada isi atau substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh proses serta serangkaian langkah dan interaksi yang

terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut (Brinkerhoff, 1996). Penulis akan melihat bagaimana D-8 sebagai sebuah organisasi internasional menjalankan proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari *agenda setting, formulasi dan adopsi, implementasi, serta evaluasi*.

Pada pertemuan Kuala Lumpur 2009, D-8 mengakui pentingnya ketahanan pangan bagi perekonomian D-8 dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan upaya kolaboratif dalam meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketahanan pangan. Inisiatif Kuala Lumpur didukung untuk diimplementasikan oleh semua negara D-8 untuk mengatasi ketahanan pangan (D-8 Ministers of Agriculture, 2009). Lima inisiatif utama yaitu bank makanan, pupuk, pakan ternak, standar & isu-isu perdagangan, serta kelautan dan perikanan telah diuraikan dalam Inisiatif Kuala Lumpur untuk Mengatasi Ketahanan Pangan di Delapan Negara Berkembang (D-8).

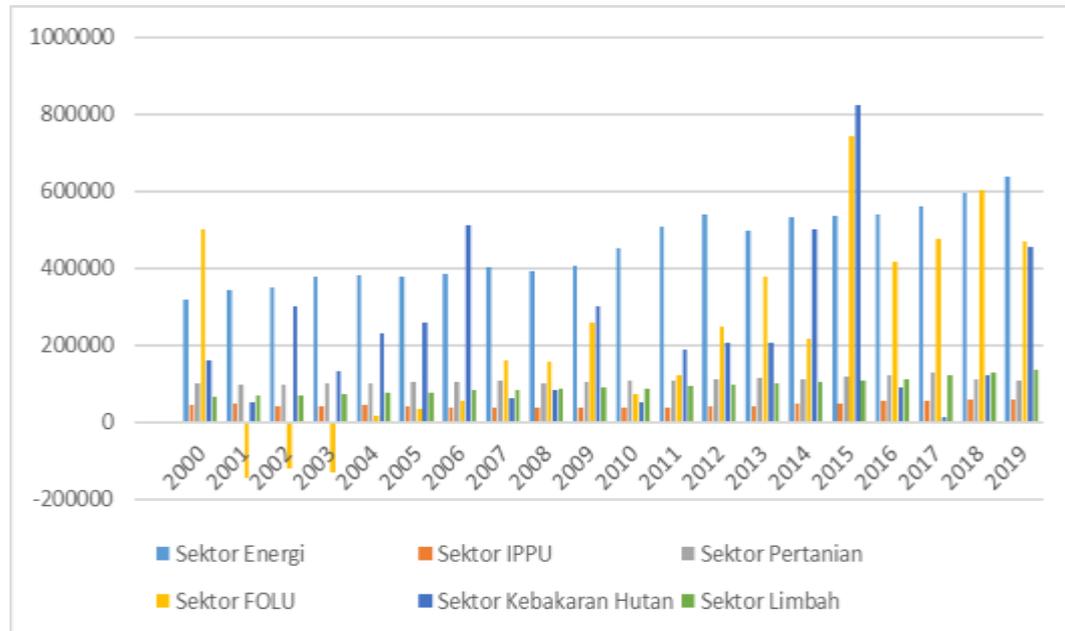
Hingga pada tahun 2021, pada pertemuan ke 7 D-8 *Senior Official and Ministerial Meeting on Agriculture and Food Security*, negara negara anggota D-8 menyatakan pendapat masing-masing terkait CSA. Dalam hal ini, Iran menyebut ‘CSA merupakan pendekatan yang relatif baru dalam mengembangkan kondisi Teknis, Politik dan Finansial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan’ (Annex-VI Iran, 2022). Bagi Pakistan, CSA dianggap penting karena pertanian adalah kontributor dan korban perubahan iklim :

1. Pada tahun 2050, sekitar 70% lebih banyak makanan akan dibutuhkan untuk memberi makan populasi yang terus bertambah, terutama di negara-negara berkembang.
2. Karena perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu dan pola curah hujan berubah, lebih banyak cuaca ekstrem akan berpotensi mengurangi produksi pangan global.
3. Perubahan iklim dan pembangunan sosial ekonomi akan semakin mendegradasi basis sumber daya alam.
4. Pertanian perlu berevolusi untuk mengatasi pendorong-pendorong perubahan ini untuk produktivitas yang lebih tinggi dan produk yang lebih baik (Annex-VI CSA Pakistan, 2022).

Adapun Indonesia juga telah menyiapkan proposal perencanaan CSA yang diproyeksikan hingga tahun dari tahun 2022 sampai 2024 yang dipetakan sesuai tempat, seperti penggunaan CSA di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan lainnya yang meliputi antara lain peningkatan produktivitas, efisiensi input pertanian, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan kelestarian lingkungan. Hal ini juga serupa dengan negara-negara lain yang mengangkat permasalahan dengan solusi CSA. Kemudian diadakannya pertemuan yang diadakan di Bangladesh pada tahun 2022 D-8 mengangkat tema : “Mengeksplorasi Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan dan Mempromosikan Pertanian Iklim Cerdas: Isu-isu kunci bagi negara-negara Anggota D-8”. Pada pertemuan ini anggota tim D-8 memberikan fokus pada upaya dan memungkinkan komunitas pertanian untuk menuai manfaat dari produksi mereka melalui adaptasi teknik cerdas dan teknologi baru (D-8 Secretary General, 2022).

Pertanian Cerdas-Iklim (CSA) untuk sistem produksi pertanian berkelanjutan dengan penekanan khusus pada aspek lingkungan dan keamanan pangan adalah faktor penting yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan politik di setiap negara, dan produksi pertanian saat ini membutuhkan perhatian yang mendesak. Grup D-8 mengakui pentingnya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), terutama Tujuan 1 dan Tujuan 2, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan memperkenalkan Pertanian Cerdas Iklim (CSA) untuk memastikan sistem produksi pertanian yang berkelanjutan, dengan penekanan pada pertimbangan lingkungan (Seventh D-8 Agricultural Ministerial Meeting on Agriculture and Food Security, 2022). Pembahasan pada konferensi tersebut menghasilkan serangkaian tindakan yang diambil oleh para Menteri dan Kepala Delegasi dari Negara-Negara Anggota D-8, mereka mendukung proposal proyek *Promoting and Scaling up Climate Smart Agriculture "PSCSA"* yang diusulkan oleh negara Bangladesh, mendorong kerjasama dalam pengembangan pertanian cerdas iklim (CSA), serta mengakui pentingnya memantau indikator praktik pertanian berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mereka mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan proposal proyek CSA, menjelajahi peluang kemitraan dengan organisasi internasional. Tidak dipungkiri bahwa perubahan iklim merupakan tantangan besar saat ini, dengan

emisi gas rumah kaca yang terus meningkat secara global dengan tingkat yang mengkhawatirkan seperti yang di gambarkan pada grafik dibawah.



Gambar 1. Tingkat penyumbang emisi GRK berdasarkan sektor (ribu ton).

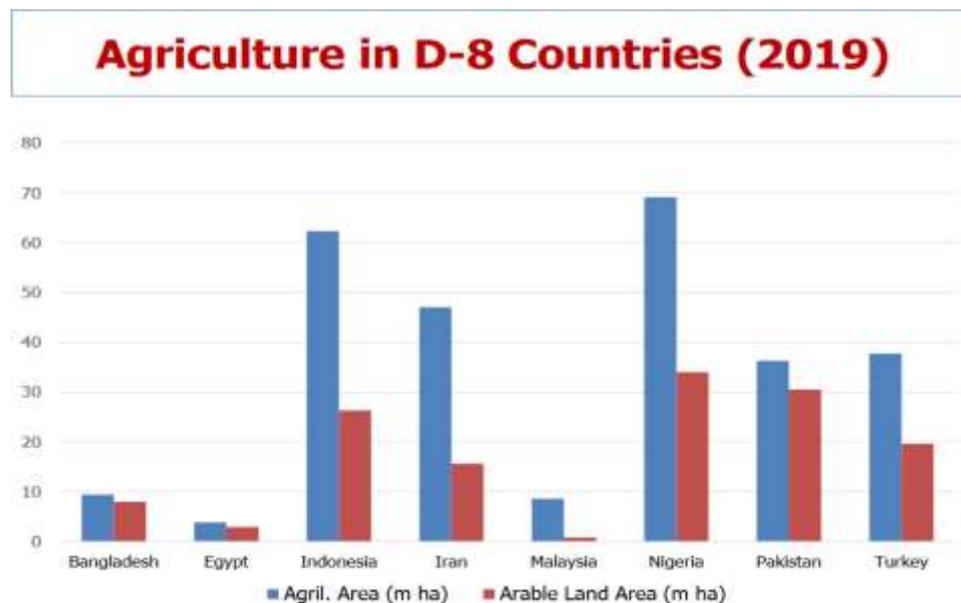
Sumber : World Bank

Ada banyak pilihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan dan meminimalkan dampak produksi yang merugikan terhadap lingkungan. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, sementara teknologi adaptasi mencakup penyesuaian waktu penanaman, penggunaan varietas tahan kekeringan dan salinitas, serta manajemen air yang lebih efektif (Djufri, 2022). Praktik pengelolaan dan teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mencakup praktik dengan fokus eksplisit pada adaptasi dan praktik dengan cakupan lebih luas pada pengurangan risiko produksi dan pengurangan emisi.

Usaha-usaha pemerintah juga dilakukan secara bersama-sama dengan negara-negara agraris lainnya, terutama negara dengan pertanian padi sawah yang mendominasi. Seperti halnya di Bangladesh menerapkan diversifikasi sistem tanam, di Mesir mengembangkan tanaman tahan panas, kekeringan dan garam, dan di Indonesia menerapkan diversifikasi produksi dengan lebih toleran kekeringan dan tanaman yang cocok secara lokal (Developing-8, 2024). Dengan begitu D-8

sebagai sebuah organisasi internasional memiliki peran untuk mempayungi negara anggotanya dalam melakukan kerjasama dan mengatasi permasalahan perubahan iklim bersama-sama, Konsep Pertanian Cerdas Terkait Iklim (Climate-Smart Agriculture - CSA) muncul sebagai kerangka kerja yang relevan bagi D-8. Konsep CSA menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu peningkatan produktivitas pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture/CSA) adalah pendekatan yang membantu memandu tindakan untuk mengubah sistem pertanian pangan menuju praktik ramah lingkungan dan berketahanan iklim. CSA bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama: peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan; beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim; dan mengurangi dan/atau menghilangkan emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan (FAO, 2021). Melihat dari luasnya lahan pertanian negara-negara D-8 dapat terlihat bahwa sebagian besar negara anggotanya memiliki sektor pertanian sebagai titik vital dan sumber pendapatan masyarakatnya, seperti yang terlihat pada gambar grafik di bawah.



Gambar 2. Luas lahan sektor pertanian negara D-8.
Sumber: Developing-8

Hal ini tidak dipungkiri karena kawasan Asia, khususnya anggota D-8 merupakan kawasan yang didominasi oleh pertanian sawah, yang akan berkontribusi terhadap emisi sekitar 44% gas rumah kaca dari lahan pertanian dunia dan memerlukan lebih banyak perbaikan. Sebagai sebuah organisasi internasional, D-8 melihat sektor pertanian sebagai sektor vital yang mempengaruhi ekonomi serta politik negara anggotanya, melihat bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang nyata terhadap sektor vital tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh D-8 dapat dilihat bahwa dampak yang dihasilkan perubahan iklim kepada sektor pertanian negara anggota di tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Data dampak perubahan iklim terhadap negara D-8

Dampak Perubahan Iklim	Negara Terdampak
Mempercepat intensitas & cakupan salinitas	Bangladesh, Egypt, Indonesia, Nigeria
Intensitas kekeringan	Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan and Turkey
Curah hujan yang tidak menentu	Bangladesh, Indonesia, Iran, Nigeria
Suhu tinggi (0,5-2,5°C)	Bangladesh, Egypt, Iran, Malaysia
Banjir bandang	Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Pakistan
Wabah penyakit dan hama	Bangladesh, Egypt
Menipisnya keanekaragaman hayati	Bangladesh, Indonesia
Pemupukan karbon dioksida	Iran
Badai	Bangladesh, Indonesia
Tanah terendam	Bangladesh, Pakistan
Musim dingin parah/musim semi palsu	Turkey

Sumber : Developing-8

Dalam pertemuan antar Menteri pertanian ke-7 D-8, FAO mempresentasikan dampak perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini secara global serta pendekatan CSA sebagai solusi dalam menghadapi dampak tersebut. Dampak dari perubahan iklim banyak terlihat dari beberapa indikator seperti data yang dirilis oleh FAO pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Perspektif FAO terhadap dampak perubahan iklim dan CSA

Fakta Global	Pendekatan CSA
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan frekuensi dan intensitas yang ekstrim peristiwa- peristiwa sudah jelas; kekeringan, curah hujan tinggi dan banjir. • Kenaikan muka air laut dan berkurangnya debit sungai menyebabkan peningkatan intrusi air asin di delta dan muara mengancam budidaya perikanan. • Salju dan es Himalaya yang menyediakan jumlah yang sangat besar air untuk pertanian di Asia diperkirakan akan menurun sebesar 20% pada tahun 2030. • Sektor pertanian di negara-negara berkembang menyerap 22% (kurang-lebih) dampak ekonomi disebabkan oleh bahaya dan bencana alam skala menengah/besar. • Adaptasi melalui perubahan produksi pangan pengelolaan – khususnya penanaman kurma, kultivar pilihan dan irigasi diperkirakan mempunyai potensi untuk itu meningkatkan hasil rata-rata 7-15%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas dan Pendapatan, Adaptasi, dan Mitigasi • Sistem pertanian pangan yang ramah lingkungan dan tahan iklim • Prinsip-prinsip agroekologi yang berhubungan dengan pertanian dan pengelolaan ekologi serta sosial dan aspek politik dari sistem pertanian pangan. • Pelayanan bagi petani dan pengelolaan yang lebih baik pertanian, tanaman pangan, peternakan, budidaya perikanan dan penangkapan perikanan untuk menyeimbangkan ketahanan pangan jangka pendek dan kebutuhan penghidupan dengan prioritas adaptasi dan mitigasi. • Perubahan dalam sistem pangan yang lebih luas

Sumber : FAO (2018)

Perubahan iklim global merupakan hal niscaya dan pasti terjadi sejalan dengan aktivitas manusia di bumi. Hal ini menjadi isu global yang mendesak yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim telah mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Peran D-8 sebagai penyelenggara kerjasama antar negara berkembang memiliki potensi besar dalam mempromosikan CSA sebagai agenda internasional yang dapat membantu menghadapi perubahan iklim dan berperan dalam peningkatan hasil pertanian secara berkelanjutan. Bagaimana peran dan potensi D-8 merupakan hal menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan CSA.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai organisasi Internasional, D-8 (Developing-8) didirikan berdasarkan kesamaan permasalahan yang sama. Sejak tahun 2009 bidang pertanian menjadi salah satu fokus dalam agenda D-8. Pada awalnya fokus D-8 di bidang pertanian terkait dengan Bank Benih dengan dasar bahwa telah terjadi kepunahan terhadap sumberdaya genetik tanaman di wilayah anggota D-8.

Fokus dibidang pertanian jauh lebih serius pada tahun 2011 yang mengusung tema ketahanan pangan dengan menyadari bahwa negara anggotanya merupakan negara-negara agraris, yang PDRB nya ditopang oleh pertanian. Ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembahasan bidang pertanian yang bertumpu pada hasil produksi pangannya. Disisi lain tantangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas mengalami banyak kendala serta ancaman teknis dan non teknis serta ancaman biotik dan abiotik. Menyadari betapa besarnya resiko dan ancaman terhadap sektor pertanian yang notabene merupakan sektor pemasok pangan utama, maka secara serius D-8 telah menawarkan pertanian cerdas iklim untuk menjadikan sistem pertanian lebih tangguh, efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Perubahan iklim disatu sisi dan kerawanan pangan disisi lainnya sebagai akibat dari perubahan iklim global.

Oleh karena itu ketahanan pangan dimasa mendatang sangat tergantung pada adaptasi dan mitigasi terhadap iklim, salah satunya adalah dengan penerapan

pertanian cerdas iklim untuk menunjang ketahanan pangan. Perubahan arah kebijakan atau fokus di bidang pertanian D-8 terjadi dalam rangka mengantisipasi perubahan arah pertanian secara global terutama kebijakan yang disepakati dalam lembaga FAO serta mengadaptasi adanya pertumbuhan teknologi dibidang pertanian, oleh karena itu penelitian ini akan mampu menjawab satu pertanyaan, yaitu: **Bagaimana perubahan kebijakan sektor ketahanan pangan organisasi D-8?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan organisasi internasional D-8 (Organisasi Kerjasama Pembangunan Delapan).
2. Mendeskripsikan kebijakan ketahanan pangan D-8.
3. Mendeskripsikan perubahan kebijakan Ketahanan Pangan D-8.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memiliki informasi dan pengetahuan terkait dengan proses pengambilan kebijakan ketahanan pangan organisasi internasional terhadap negara anggota.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menguatkan argumennya, penulis melihat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam menulis tulisan ini. Penelitian mengenai perubahan kebijakan sudah ada dan sudah diteliti oleh para akademisi, oleh karenanya penulis memilih lima (5) penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam tulisan ini.

Jurnal pertama ditulis oleh Brinkerhoff (1996) yang meneliti mengenai reformasi kebijakan negara-negara berkembang yang sedang terjadi saat itu, yang terfokus pada implementasi pasca perubahan kebijakan. Pada pertengahan 1990-an, negara-negara berkembang dihadapkan pada fase kedua dari reformasi kebijakan ekonomi dan sektoral yang membutuhkan penyesuaian yang berlangsung secara bertahap dan dalam jangka panjang (Brinkerhoff, 1996). Brinkerhoff (1996) menekankan bahwa memperhatikan dengan serius proses implementasi kebijakan adalah kunci utama dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan, menyoroti bahwa mengabaikan faktor-faktor seperti lembaga, konteks, dan jalannya proses implementasi dapat menghambat kesuksesan dari upaya reformasi kebijakan, juga pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Brinkerhoff (1996) berpendapat bahwa perubahan kebijakan sebagai langkah-langkah yang lebih kompleks daripada tindakan cepat atau dramatis, yang memerlukan perhatian terhadap dimensi proses implementasi serta konten kebijakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan meliputi lebih dari sekadar pengubahan dalam teks kebijakan, tetapi juga melibatkan proses yang meluas dan interaktif.

Selanjutnya berupa bagian buku yang ditulis oleh Vetterlein (2007) yang dimana membahas terkait dengan perubahan kebijakan pada organisasi internasional serta faktor yang mempengaruhinya, Vetterlein (2007) menggunakan studi kasus pada organisasi internasional berupa World Bank dan

Internasional Monetary Fund, dia membuat perbandingan bagaimana kedua organisasi tersebut mengubah kebijakan-kebijakan serta apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Vetterlein (2007) mendefinisikan perubahan kebijakan sebagai respon dari organisasi terhadap tantangan prosedur dan pandangan umum organisasi terkait dengan isu-isu tertentu (Vetterlein, 2007). Perubahan menurutnya sering kali dipicu oleh tekanan dari luar organisasi, baik itu dari negara-negara maupun aktor kolektif lainnya seperti LSM, tekanan juga dapat timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Vetterlein (2007) menyatakan bahwa mandat organisasi mempengaruhi bagaimana organisasi merespons tekanan dari luar dan seberapa terbuka organisasi tersebut terhadap perubahan.

Penelitian ke-3 (tiga) berasal dari jurnal yang ditulis oleh Michael N. Barnett dan Martha Finnemore (1999) dengan topik organisasi internasional dan membandingkannya berdasarkan pendekatan sosiologi dan ekonomi. Barnett dan Finnemore menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan di organisasi internasional (OI) seringkali dieksplorasi dari perspektif teoritis yang lebih memusatkan pada pertanyaan mengenai alasan di balik penciptaan OI. Ini terutama terlihat dalam pendekatan ekonomi, yang sering kali menyoroti mengapa OI pertama kali dibentuk (Barnett & Finnemore, 1999). Pendekatan ekonomi melihat OI sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam lingkungan global yang dilihat sebagai arena persaingan antar negara. Dalam perspektif ini, OI dianggap sebagai alat yang diciptakan oleh negara-negara untuk memajukan kepentingan ekonomi dan politik mereka sedangkan sosiologi menyoroti pentingnya budaya, norma, dan kekuasaan dalam membentuk perilaku organisasi internasional (OI). Mereka melihat lingkungan OI sebagai lebih dari sekadar tempat di mana transaksi ekonomi terjadi, tetapi juga sebagai wilayah di mana norma, nilai, dan hierarki kekuasaan berpengaruh dalam membentuk kebijakan dan tindakan OI (Barnett & Finnemore, 1999).

Selanjutnya penelitian dari Michael Howlett dan Ramesh (2002) yang membahas bagaimana internasionalisasi mempengaruhi sebuah kebijakan. Jurnal tersebut mengulas bagaimana faktor-faktor baik dari luar maupun dalam negeri, seperti standar internasional, kesepakatan perdagangan, diplomasi global, arus teknologi, dan masalah lingkungan, memengaruhi kebijakan nasional.

Tabel 3. Data Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Teori Konsep	Fokus	Hasil Penelitian
Derick W. Brinkerhoff	<i>Process Perspectives on Policy Change: Highlighting Implementation.</i>	Pendekatan Manajemen Proses dan Perubahan Kebijakan.	Perubahan kebijakan yang terjadi pada negara berkembang serta faktor implementasinya.	Analisis terhadap perubahan kebijakan negara berkembang pasca fase ke-2 reformasi kebijakan ekonomi dan Sektoral.
Antje Vetterlein	<i>Change in international organizations: innovation or adaptation? A comparison of the World Bank and the International Monetary Fund</i>	Principal-agent (P-A) dan sosiologi organisasi	Perubahan kebijakan yang terjadi pada organisasi internasional terutama World Bank dan IMF	Perbandingan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan yang terjadi antara World Bank dan IMF
Michael N. Barnett dan Martha Finnemore	<i>The Politics, Power, and Pathologies of International Organization</i>	Organisasi internasional dan pendekatan konstruktivis	Pengertian organisasi internasional berdasarkan pandangan ekonomi dan sosiologi	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan arah kebijakan organisasi internasional
Michael Howlett dan M. Ramesh	<i>The Policy Effects of Internationalization: A Subsystem Adjustment Analysis of Policy Change</i>	Kebijakan publik dan policy subsystems	Pengaruh internasionalisasi terhadap sebuah kebijakan.	faktor-faktor baik dari luar maupun dalam negeri, seperti standar internasional, kesepakatan perdagangan, diplomasi global, arus teknologi, dan masalah lingkungan, memengaruhi kebijakan nasional suatu negara
Charles P. Martin-Shields dan Wolfgang Stojetz	<i>Food security and conflict: Empirical challenges and future opportunities for research and policy making on food security and conflict</i>	Konflik dan keamanan pangan.	Hambatan dan kelebihan dalam pengambilan data keamanan pangan dan konflik dalam pembuatan kebijakan serta penelitian.	Analisis hubungan antara keamanan pangan dan konflik, serta pengungkapan hambatan yang terjadi dalam pengambilan data topik Tersebut.

Sumber : Diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber.

Menurut Howlett dan Ramesh perubahan kebijakan adalah hasil dari proses yang kompleks dan bervariasi yang melibatkan interaksi antara berbagai elemen. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan mencakup modifikasi dalam tujuan, alat, atau implementasi kebijakan yang ada. Ini bisa dipicu oleh gangguan dari luar seperti krisis atau perubahan politik, atau karena pembelajaran dari pengalaman sebelumnya (Howlett & Ramesh, 2002).

Penelitian terakhir ditulis oleh Martin-Shields dan Stojetz (2018) yang membahas hubungan antara keamanan pangan dan konflik, serta tantangan dan kemajuan dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan untuk memahami hubungan antara keamanan pangan dan konflik. Selain itu, jurnal ini membahas faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kebijakan domestik suatu negara terkait dengan keamanan pangan, termasuk norma-norma internasional, perjanjian perdagangan, kerjasama politik global, aliran teknologi, dan tantangan lingkungan (Martin-Shields & Stojetz, 2018). Menurut Shield dan Stojetz, tantangan utama dalam pengumpulan data keamanan pangan di zona konflik untuk pembuatan kebijakan ada pada kebutuhan data yang lebih andal dan informatif mengenai variabel sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan, adanya tantangan praktis dan etis yang muncul dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program di zona konflik, serta meskipun banyak intervensi yang berhasil dilakukan di tingkat subnasional terkait dengan keamanan pangan, seringkali dampaknya hanya diasumsikan tanpa diuji secara ketat, dan proses pembelajaran sistematis jarang terjadi (Martin-Shields & Stojetz, 2018).

Penelitian terdahulu diatas telah memberikan tambahan ilmu dan informasi yang berharga bagi penulis. Setiap penelitian memberikan sudut pandangnya sendiri tentang perubahan kebijakan, organisasi internasional, dan keamanan pangan, yang merupakan fokus utama penelitian skripsi ini.

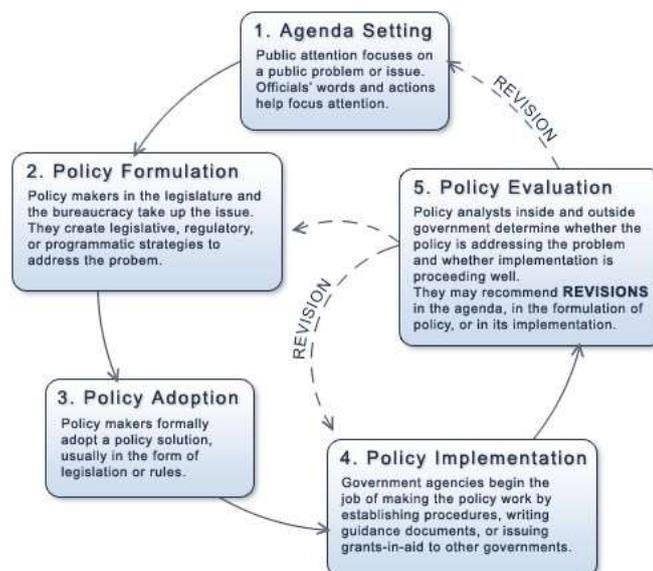
2.2 Landasan Konseptual

Dibagian ini peneliti akan memberikan penjelasan tentang konsep atau teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Teori ini membantu peneliti memahami

dan menganalisa hasil penelitian dan membantu peneliti menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan, atau memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan.

2.2.1 Perubahan Kebijakan

Menurut Vetterlein (2007) mendefinisikan perubahan kebijakan sebagai respon dari organisasi terhadap tantangan prosedur dan pandangan umum organisasi terkait dengan isu-isu tertentu. Perubahan menurutnya dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal organisasi. Faktor eksternal sering kali dipicu oleh tekanan dari luar organisasi, baik itu dari negara-negara maupun aktor kolektif lainnya seperti LSM. Disisi lain perubahan kebijakan juga bisa disebabkan faktor internal dimana tekanan juga dapat timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Howlett dan Ramesh melihat perubahan kebijakan sebagai hasil dari proses yang kompleks dan bervariasi yang melibatkan interaksi antara berbagai elemen. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan mencakup modifikasi dalam tujuan, alat, atau implementasi kebijakan yang ada. Ini bisa dipicu oleh gangguan dari luar seperti krisis atau perubahan politik, atau karena pembelajaran dari pengalaman sebelumnya (Howlett & Ramesh, 2002).



Gambar 3. Policy Making Process and Policy Implementation

Sumber: Texas University

Menurut Brinkerhoff, perubahan kebijakan tidak hanya mencakup perubahan pada isi atau substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh proses yang terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut (Brinkerhoff, 1996). Dalam jurnal "*Process Perspectives on Policy Change*" oleh Derick W. Brinkerhoff, perubahan kebijakan melibatkan serangkaian langkah dan interaksi untuk melaksanakan reformasi kebijakan secara efektif. Proses ini lebih dari sekadar menentukan isi kebijakan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, yang melibatkan manajemen yang fleksibel dan pembelajaran selama pelaksanaan.

Proses dalam pembuatan kebijakan diawali dengan melihat adanya masalah. Dalam hal ini masalah tersebut merupakan masalah sosial yang perlu diidentifikasi serta adanya tindakan dari pemerintah, yang selanjutnya memasukkan masalah ini ke dalam agenda pemerintah untuk ditangani lebih lanjut (*agenda setting*). Agenda ini merupakan daftar masalah yang menarik perhatian pemerintah, bukan seperti agenda media dan publik. *Agenda setting* mencakup pemilihan masalah dan isu-isu tertentu. Proses ini membantu menentukan strategi dan langkah-langkah yang akan diambil pada tahap kebijakan selanjutnya. Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat menerima tingkat perhatian yang sama (Fischer dkk., 2007).

Tahap selanjutnya berupa perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan adopsi kebijakan (*policy adoption*). Pada tahap siklus kebijakan ini, masalah, proposal, dan tuntutan diubah menjadi program-program pemerintah melalui proses perumusan dan adopsi kebijakan. Proses ini mencakup penetapan tujuan dan pertimbangan berbagai alternatif tindakan. Perumusan kebijakan bersifat informal dan melibatkan partisipasi kelompok kepentingan. Saat sampai pada adopsi akhir suatu opsi kebijakan, pilihan yang diambil dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya dan pembagian kompetensi di antara aktor-aktor terkait. Penetapan tujuan dan pertimbangan alternatif menjadi titik fokus, dengan pengambilan keputusan melibatkan tidak hanya pengumpulan informasi, tetapi juga penyelesaian konflik di antara berbagai pihak. Meskipun perumusan dan adopsi kebijakan sering dianggap sebagai dua tahap terpisah, keduanya diperlakukan sebagai sub-tahap dalam satu tahap dalam siklus kebijakan (Fischer dkk., 2007).

Setelah tahap perumusan dan adopsi kebijakan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan atau penegakan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga dan organisasi yang bertanggung jawab. Werner Jann dan Kai Wegrich mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "proses yang terjadi antara penetapan niat jelas pemerintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan hingga dampak yang muncul di dunia nyata" (Fischer dkk., 2007). Mereka menekankan bahwa tahap ini sangat penting karena tindakan politik dan administratif di lapangan sering kali tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tujuan, program, atau undang-undang yang telah ditetapkan. Akibatnya, kebijakan dan niat yang ada sering kali mengalami perubahan atau penyimpangan; pelaksanaannya bisa tertunda atau bahkan terhenti.

Jann dan Wegrich menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan yang ideal mencakup beberapa elemen, yaitu:

1. Spesifikasi program yang jelas (misalnya, bagaimana dan oleh lembaga mana program tersebut harus dilaksanakan? Bagaimana undang-undang atau program itu sebaiknya ditafsirkan?);
2. Alokasi sumber daya (misalnya, bagaimana anggaran akan didistribusikan? Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program? Unit mana yang akan mengelola pelaksanaan?);
3. Pengambilan keputusan (misalnya, bagaimana pelaksanaan keputusan untuk setiap kasus akan dilaksanakan?).

Pembuatan kebijakan dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mengurangi masalah yang ada, dengan evaluasi sebagai aspek utama dalam tahap siklus kebijakan ini. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan serta dampaknya, dan evaluasi ini dapat dilakukan sepanjang proses pembuatan kebijakan, bukan hanya pada akhir (Fischer dkk., 2007). Kebijakan harus berkembang secara iteratif, dengan solusi yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan sepanjang proses reformasi (Brinkerhoff, 1996). Berikut merupakan poin-poin dalam proses perubahan kebijakan menurut Brinkerhoff, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

Selain fokus pada konten kebijakan, perhatian juga harus diberikan pada proses implementasi. Ini melibatkan manajemen yang fleksibel dan pembelajaran terus-menerus, yang menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat diterapkan secara otomatis atau linear.

2. Kompleksitas dan Interaksi

Implementasi kebijakan melibatkan interaksi yang kompleks antara dimensi sosial, politik, budaya, dan organisasi, serta memerlukan manajemen perubahan yang mencakup resolusi konflik, perencanaan kontingensi, dan adaptasi.

3. Partisipasi dan Kepemilikan Lokal

Keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi aktif sangat penting dalam proses perubahan kebijakan. Kepemimpinan lokal dan kepemilikan atas reformasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi.

4. Manajemen Implementasi dan Kapasitas Institusional

Pendekatan manajemen yang baik dan peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan baru dan mencapai hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan dalam jurnal ini didefinisikan sebagai proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, manajemen yang fleksibel, dan kepemilikan lokal untuk mencapai reformasi yang berkelanjutan dan efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melihat bagaimana perubahan arah organisasi D-8 terkait ketahanan pangan dan prosesnya saat ini berdampak pada negara anggota. Karena itu sangat penting dilakukan penelitian bagaimana perubahan arah organisasi, faktor yang mempengaruhi, apa dampak dan konsekuensi dari perubahan tersebut.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional ialah sebuah institusi yang dibentuk oleh kesepakatan di antara dua atau lebih negara berdaulat untuk melakukan interaksi politik secara reguler (Jacobson, 1979). Menurut pendekatan ekonomi, OI dianggap sebagai alat yang diciptakan oleh negara- negara untuk memajukan kepentingan ekonomi dan

politik mereka (Barnett & Finnemore, 1999). Bentuk organisasi Internasional secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi internasional pemerintah (International Governmental Organization/IGO) dan organisasi Internasional Non Pemerintah (Internasional Non Governmental Organization/INGO). Organisasi IGO terbagi menjadi dua bagian lagi yaitu IGO Global dan IGO regional. Contoh IGO Global seperti PBB, WTO, UNICEF, World Bank dan IMF. Bentuk IGO regional seperti ASEAN, NATO, D-8 dan lain sebagainya. Organisasi internasional Pemerintah (IGO) merupakan kumpulan negara-negara secara resmi, yang dapat diklasifikasikan menjadi :

1. *Global membership and general-purposes organizations*. Merupakan organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai cakupan yang luas dan berbagai fungsi seperti pertahanan dan keamanan, kerja sama sosial dan ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya.
2. *Global membership and limited-purposes organizations*. Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, *International Bank of Reconstruction Development (IBRD)*, *World Health Organization (WHO)*, dan UNESCO.
3. *Regional Membership and General Purposes organizatios*. Merupakan organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatan diantaranya dalam bidang-bidang seperti keamanan, politik, ekonomi sosial.
4. *Regional Membership and limited Purpose Organization*. Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki sub-devisi dalam bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi- organisasi pertahanan misalnya NATO dan LAFTA (Sitepu 2011, 139). Ruang lingkup dari organisasi pemerintah terbagi dalam regional maupun global serta mencakup masalah- masalah sosial, ekonomi serta perang dan damai. Pertumbuhannya sendiri tidak terbatas terhususnya pada tingkat regional.

Fungsi dari IGO adalah untuk mengatasi masalah global secara efektif tanpa adanya perang serta memfasilitasi kepentingan dari negara-negara anggotanya dalam melakukan komunikasi serta kerja sama dengan sesama anggota negara lain

dalam mencapai tujuan bersama. Merujuk pada teori organisasi internasional dari Archer (Archer, 2001) ada 3 fungsi dari IGO yaitu:

1. Negara menggunakan IGO sebagai instrument untuk berdiplomasi dengan negara yang lain karena pada dasarnya negara-negara membentuk IGO berkaitan dengan kepentingan negara mereka yang bersangkutan dengan kepentingan negara lain.
2. Sebagai tempat forum untuk berkomunikasi untuk bekerjasama, persetujuan bahkan pertentangan dimana arena tersebut bersifat netral. Arena ini menjadi tempat untuk mengedepankan kepentingan, menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu didepan forum.
3. IGO berperan sebagai aktor yang tidak terpengaruh dari luar ketika membuat sebuah kebijakan. Dengan memiliki kapasitas sebagai aktor yang di tentukan oleh rekomendasi, resolusi dan mandat pada saat di bentuknya organisasi tersebut.

2.2.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut konferensi pangan sedunia 1996 berupa “Ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke cukup makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat.” Berdasarkan dari definisi tersebut, FAO (Food and Agriculture Organization) mengidentifikasi empat dimensi utama ketahanan pangan berupa,

1. Ketersediaan Fisik Makanan: Terkait dengan produksi, persediaan, dan perdagangan makanan.
2. Akses Ekonomi dan Fisik ke Makanan: Fokus pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga untuk memastikan akses yang memadai terhadap makanan.
3. Pemanfaatan Makanan: Melibatkan cara tubuh memanfaatkan nutrisi dalam makanan melalui praktik perawatan, persiapan, keragaman diet, dan distribusi makanan di dalam rumah tangga.
4. Stabilitas dari Tiga Dimensi Lain dari Waktu ke Waktu: Penting untuk menjaga stabilitas akses makanan secara periodik untuk mencegah penurunan kondisi

gizi, terutama dalam menghadapi faktor- faktor seperti kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, dan masalah ekonomi (FAO, 2008).

Membangun keberlanjutan ketahanan pangan merupakan suatu yang absolut yang harus dilakukan oleh negara. Indonesia menuangkan tentang ketahanan pangan berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2012, dimana ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ada tiga kata kunci dari filosofis ketahanan pangan tersebut yaitu kecukupan pangan dan gizi dari segi (1) jumlah, (2) kualitas, dan (3) berkelanjutan untuk semua orang. Dalam kehidupan berbangsa bernegara isu ketahanan pangan meliputi beragam aspek atau dimensi baik itu politik, ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya. Menurut Suryana (2014) faktor yang paling dominan adalah politik, dimana proses pengambilan kebijakan dalam pemenuhan ketahanan pangan banyak ditentukan oleh kebijakan politik suatu bangsa. Penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melibatkan berbagai sektor dalam rangkaian isu terkait produksi, ketersediaan pangan, gizi, dan kesehatan (Tono dkk., 2023).

Isu ketahanan pangan semakin memanas setelah terjadi pandemi covid-19 pada akhir tahun 2019, dimana beberapa ahli ketahanan pangan menyebutkan terjadinya potensi peningkatan jumlah rawan pangan, dan berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian sehingga hal ini akan membawa masalah yang lebih luas pada terganggunya ketahanan pangan dan sektor pertanian (Workie et. al. 2020). Di Indonesia, Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja ketahanan pangan nasional. Pencapaian positif pada berbagai indikator TPB nomor 2 dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun sebelum terjadi Pandemi Covid-19 tahun 2020 telah terdisrupsi oleh pandemi tersebut. Segmen populasi yang paling terpengaruh oleh pandemi ini adalah keluarga miskin dan hampir miskin serta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan penyandang disabilitas (Suryana et al, 2021).

Selain itu ketahanan pangan tentu saja dipengaruhi oleh adanya pengaruh sumberdaya alam (SDA) dan iklim, Kerusakan SDA dan perubahan iklim global

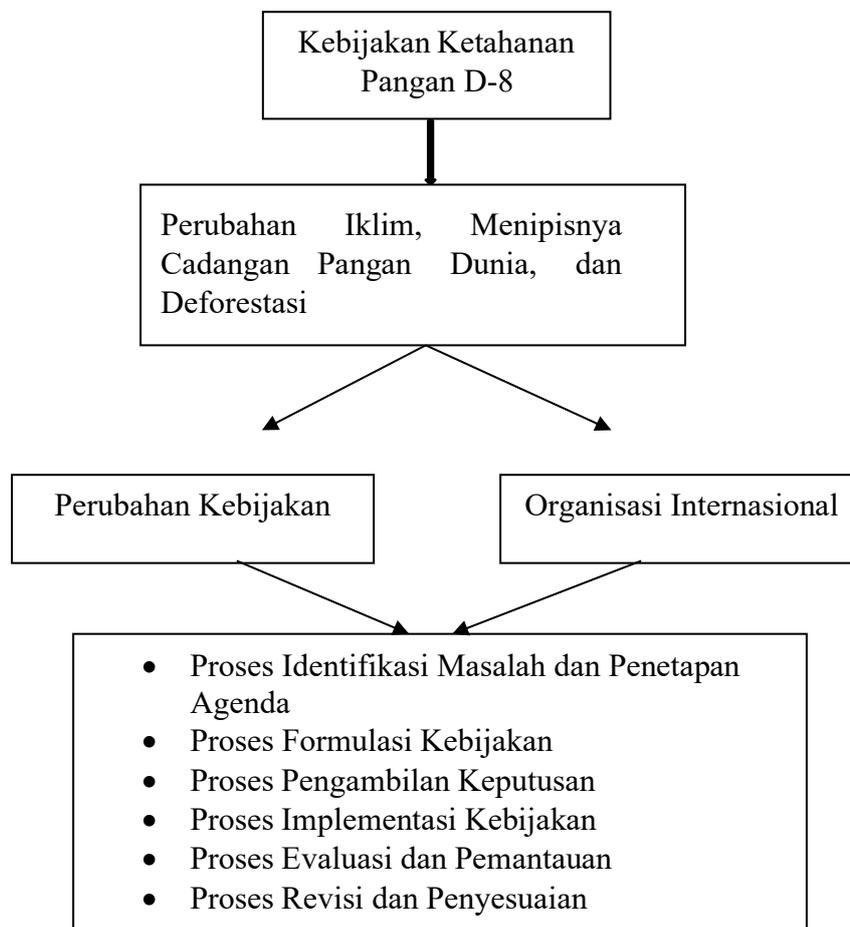
dikhawatirkan akan mengurangi laju pasokan pangan. Menurut Chasek (2022) secara global, sekitar 25% lahan pertanian telah terdegradasi sangat berat. SDA merupakan modal utama untuk proses produksi pangan, terutama bagi pangan yang dihasilkan dengan mengandalkan sumber daya lahan dan air. Di negara yang pemenuhan pangannya menggantungkan pada sumber daya alam, maka kelangkaannya dapat mempengaruhi kinerja penyediaan pangan dari produksi domestik, dan pendapatan petani, yang selanjutnya dapat mempersulit pencapaian ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu SDA yang penting adalah hutan. Perubahan fungsi hutan akan berpengaruh pada produktivitas lahan. Hutan membantu menyimpan air tanah dan bertindak sebagai penyerap karbon, melestarikan ekosistem. Hilangnya hutan dan perubahan ekosistem dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, sangat penting menekankan proses produksi untuk pemenuhan kebutuhan pangan perlu dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan untuk melestarikan lingkungan, SDA dan agroekosistem (Berry et al. 2015). Dimensi SDA dan resiliensi terdiri dari tujuh indikator, yaitu paparan dampak perubahan iklim; air; lahan; lautan, sungai, dan danau; sensitivitas; komitmen politik untuk melakukan adaptasi; dan tekanan demografi (Tono dkk., 2023). Oleh karena itu penerapan CSA sejalan dengan kondisi global saat ini. Dimana CSA bisa mengadaptasi dan mitigasi kerawanan pangan dunia khususnya untuk anggota D-8.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam kerangka logis berdasarkan fakta dan data-data perubahan kebijakan Ketahanan Pangan D-8 sejak tahun 2001 sampai dengan 2021. Perubahan kebijakan ketahanan pangan akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu perubahan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Perubahan kebijakan ketahanan pangan tentu akan berimplikasi pada ketersediaan pangan, kecukupan pangan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat di setiap negara anggota D-8. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan mampu menggambarkan peran negara D-8 terhadap keberlanjutan ketahanan pangan di setiap negara anggotanya. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis,

maka ide penelitian dituangkan dalam gambar 4, yaitu berupa kerangka pemikiran penelitian yang akan dilaksanakan.



Gambar 4. Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber : Diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Harahap, 2020). Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya diterapkan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, terutama dalam studi mikro yang memfokuskan pada pola dan perilaku manusia serta faktor-faktor yang mendasarinya, yang seringkali sulit diukur dengan angka. Metode ini berlandaskan pada pemikiran induktif dan melibatkan pengamatan objektif serta partisipatif terhadap fenomena sosial (Harahap, 2020). Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik dari teori kritis, serta post- modernisme seperti yang dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida.

Penelitian kualitatif berupaya membangun dan memahami makna realitas. Oleh karena itu, penelitian kualitatif cenderung sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan keaslian (Somantri, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan subjek serta mengungkap semua fenomena yang terlihat dan makna di baliknya (Harahap, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan memberikan penjelasan empiris terkait fokus yang diteliti, menggunakan data kualitatif seperti jurnal, buku, laporan tahunan, dokumen resmi, dan wawancara dengan responden terkait. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan perubahan kebijakan sektor ketahanan pangan dalam organisasi internasional D8.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan agar strukturnya tidak terlalu umum dan tetap relevan dengan fenomena yang terjadi. Dengan demikian, fokus penelitian ini membantu penulis dalam menentukan data yang relevan sesuai topik. Fokus penelitian adalah perubahan kebijakan sektor ketahanan pangan dalam organisasi internasional D-8. Sebagai organisasi internasional, D-8 didirikan berdasarkan kesamaan masalah di antara anggotanya. Awalnya, D-8 berfokus pada pertanian, terutama terkait dengan Bank Benih. Pada tahun 2011, fokus pada pertanian menjadi lebih serius dengan tema ketahanan pangan, mengingat negara-negara anggotanya adalah negara agraris yang PDB-nya didukung oleh sektor pertanian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data berdasarkan data kualitatif yaitu:

1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama untuk keperluan penelitian tertentu. Data ini bersifat asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Penulis menggunakan data primer berupa wawancara dengan staff biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI dan staff Kementerian Luar Negeri RI/ staff pemerintah terkait yang berada di Lembaga Penelitian maupun Lembaga Ketahanan Pangan lainnya.
2. Data Sekunder Merupakan data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi berupa laporan rapat, sidang, deklarasi dan dokumen informatif lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari website organisasi internasional D-8 maupun sumber elektronik lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi Salah satu teknik dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi yang dimana penulis menganalisis dan mengumpulkan

dokumen yang relevan. Menurut Hamzah (2019), dokumen adalah kumpulan fakta dan data yang disimpan dalam bentuk dokumentasi. Data ini mencakup laporan, artefak, foto, dan sejenisnya. Sifat utama data ini adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk mempelajari peristiwa masa lalu. Secara rinci, bahan dokumentasi dibagi menjadi beberapa jenis, seperti otobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, serta data yang tersimpan di website, dan lain sebagainya (Susanto, 2022).

2. Teknik Wawancara Selain dari teknik dokumentasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban mengenai topik tertentu, yang bertujuan untuk membangun makna dalam topik tersebut. Teknik pengumpulan data ini bergantung pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau pada keyakinan dan pengetahuan pribadi. Penulis berencana melakukan wawancara dengan staff biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Luar Negeri RI/terkait.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah sistematis untuk menghimpun, memantau, dan mengatur catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta sumber lainnya. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menyampaikan hasil temuan mereka dengan baik. Berdasarkan Bogdan di dalam buku metodologi penelitian kualitatif, analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang melibatkan pencarian dan pengaturan data secara sistematis (Mahardhani, 2022). Terdapat empat (4) hal dalam pengumpulan data model Miles dan Huberman yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Selama pelaksanaan, hasil wawancara dengan informan dari berbagai unsur,

seperti pemerintah, kelompok organisasi, atau masyarakat, akan disesuaikan dengan data yang terkumpul selama proses dokumentasi.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar terfokus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian.

c. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam laporan penelitian untuk memudahkan pemahaman baik mengenai bagian-bagian spesifik maupun keseluruhan dari kegiatan penelitian. Data yang disajikan diatur secara sistematis dalam laporan akhir dan memungkinkan pembaca untuk membuat kesimpulan (Mahardhani, 2022).

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari pemahaman menyeluruh selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. Kesimpulan tersebut merupakan temuan baru yang muncul dari pengolahan hasil penelitian, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya tidak begitu jelas (Mahardhani, 2022).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai organisasi Internasional, D-8 (Developing-8) didirikan berdasarkan kesamaan permasalahan yang sama. D-8 (Developing Eight) *Organization for Economic Cooperation* adalah organisasi untuk kerja sama ekonomi di antara negara-negara berikut: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pendirian D-8 diumumkan secara resmi melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997 (D-8, 2023). Pada awal pendirian D-8, negara-negara yang terhimpun awalnya ditujukan untuk mengumpulkan kekuatan negara-negara Islam anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), yang berupaya untuk menghadapi sikap mendua negara-negara barat dan ketidakadilan pada kerjasama ekonomi global. Akan tetapi pada perkembangannya, organisasi D-8 beralih menjadi organisasi yang tidak hanya eksklusif berlandaskan agama saja, serta ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Sejak tahun 2009 bidang pertanian menjadi salah satu fokus dalam agenda D-8. Pada awalnya fokus D-8 di bidang pertanian terkait dengan Bank Benih dengan dasar bahwa telah terjadi kepunahan terhadap sumberdaya genetik tanaman di wilayah anggota D-8. Fokus dibidang pertanian jauh lebih serius pada tahun 2011 yang mengusung tema ketahanan pangan dengan menyadari bahwa negara anggotanya merupakan negara-negara agraris, yang PDRB nya ditopang oleh pertanian. Ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembahasan bidang pertanian yang bertumpu pada hasil produksi pangannya. Disisi lain tantangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas mengalami banyak kendala serta ancaman teknis dan non teknis serta ancaman biotik dan abiotik. Menyadari betapa besarnya resiko dan ancaman terhadap sektor pertanian yang notabene merupakan sektor pemasok pangan utama, maka secara serius D-8 telah menawarkan pertanian cerdas iklim untuk menjadikan sistem pertanian lebih

tangguh, efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Perubahan iklim disatu sisi dan kerawanan pangan disisi lainnya sebagai akibat dari perubahan iklim global.

Adapun beberapa kebijakan perubahan pangan yang bergeser pada D-8 dilihat melalui agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi, dan revisi. Dimana pada tahun 2009 D-8 berfokus pada produksi, pasokan, dan distribusi pupuk yang berkualitas, produksi dan pasokan pakan ternak berkualitas, pembentukan bank benih untuk memasok benih berkualitas tinggi, pembentukan sistem layanan informasi pasar untuk pakan ternak, bank benih dan pupuk, Pentingnya standar dan perdagangan. Pada 2013 D-8 berfokus pada pengenalan Program D-8 untuk Keamanan Pangan (D8-PFS), Pengenalan Jaringan Manajemen Informasi dan Pengetahuan D-8, Produksi Ternak (*Halal Food Industry*). Serta tahun 2020 berfokus pada kebijakan pengadopsian D-8 juga berfokus pada pengembangan agroindustri dan pengintegrasian petani kecil. Namun, pada tahun 2022 D-8 bergeser fokus pada CSA, hal tersebut dikarenakan dampak Covid-19, dan kekhawatiran mendalam dari negara anggota, terutama yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan yang sudah mengalami peningkatan dampak tersebut, seperti ancaman terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air, dan mata pencaharian, serta upaya untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya serta mencapai pembangunan berkelanjutan. D-8 menegaskan kembali perlunya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang kolaboratif, menyadari perlunya kerjasama yang lebih baik melalui transfer teknologi pertanian cerdas iklim.

5.2 Saran

Diharapkan penelitian ini, peneliti mengajukan saran kepada para peneliti lainnya, termasuk akademisi program studi Hubungan Internasional. Kepada para akademisi program studi hubungan internasional diharapkan agar bisa memberikan pembaruan terhadap penelitian tentang bagaimana perubahan kebijakan organisasi D-8 pada kebijakan ketahanan pangan. Dengan begitu diharapkan penelitian ini bisa membantu menambah wawasan, dan keilmuan baru pada masa yang akan datang.

SUMBER REFERENSI

- Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organization. *International Organization*, 699-732. Béland, D. (2005). Ideas and Social Policy: An Institutional Perspective. *Social Policy & Administration*, 1-18.
- Brinkerhoff, D. W. (1996). Process Perspectives On Policy Change: Highlighting Implementation. *World Development*, Vol 24, 1395-1401.
- Doğan, H. G. (2019). Contribution Of Livestock To Co2 Emission In D-8 (Developing-8) Countries: An Empirical Analyse Of Panel Data. *Applied Ecology And Environmental Research*. Fao. (2008). An Introduction To The Basic Concepts Of Food Security. Diambil Kembali Dari Food And Agriculture Organization: <https://www.fao.org/3/A1936e/A1936e00.pdf>
- Fao. (2018). World Livestock: Transforming The Livestock Sector Through The Sustainable Development Goals. Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Fao. (2023, Agustus 23). Suite Of Food Security Indicators. Diambil Kembali Dari Faostat: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/fs>
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2002). The Policy Effects Of Internationalization: A Subsystem Adjustment Analysis of Policy Change. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 4, 31-50.
- Ian Budge, L. E. (2010). Ideology, Party Factionalism and Policy Change: An integrated dynamic theory. *British Journal of Political Science*, 781-804. (1997). Istanbul Declaration. Istanbul: Developing-8.
- Katzenstein, P. J., Keohane, R. O., & Krasner, S. D. (1998). International Organization and the Study of World Politics. *International Organization*, 645-685.
- Kratochwil, F., & Ruggie, J. G. (1986). International organization: a state of the art on an art Of The State. *International Organization*, 754-775.
- Kuala Lumpur Initiative To Address Food Security In D-8 Countries. (2009). Developing Eight (D-8) Ministers' Meeting On Food Security (hal. 1-7). Kuala Lumpur: Developing-8.
- Mahardhani, A. J. (2022). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Dalam M. R. Pahleviannur, D. N. Saputra, N. D. Sinthania, V. O. Bano, E. E. Susanto, Amruddin, & M. Lisya, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Hal. 123-136). Pradina Pustaka.

- Martin-Shields, C. P., & Stojetz, W. (2018). Food Security And Conflict: Empirical Challenges And Future Opportunities For Research And Policy Making On Food Security And Conflict. *World Development*.
- Nisak, Z. (2013). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekbis*. 9(2), 468-476.
- (2022). Seventh D-8 Agricultural Ministerial Meeting On Agriculture And Food Security. Dhaka: Developing-8. (2020). Sixth D-8 Ministerial Meeting On Agriculture And Food Security. Developing-8. Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, NO. 2, 57-65. (2011). Tehran Initiative. Tehran: Developing-8.
- Vetterlein, A. (2007). Change in international organizations: innovation or adaptation? A comparison of the World Bank and the International Monetary Fund. Dalam C. W. Diane Stone, *The World Bank and Governance A Decade of Reform and Reaction* (hal. 125-144). New York: Routledge.
- Worldbank. (2021, Maret 7). Climate Smart Agriculture In Indonesia. Diambil kembali dari World Bank: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/752291622632903770/pdf/Climate-Smart-Agriculture-in-Indonesia.pdf> Berry E, Dernini S, Burlingame B, Meybeck A, Conforti P. 2015. Food security and sustainability: Can one exist without the other?. *Public Health Nutrition*. 18(13):2293- 2302. DOI:10.1017/S136898001500 021X.
- Suryana A, Hartono MD, Suryana MR. 2021. Impacts of the COVID-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 892 (2021) 012033. DOI:10.1088/1755-1315/892/1/012033. Chasek P. 2022. From Land Degradation to Land Restoration. [Internet] (Cited 2023 Mei 24] Tersedia dari: <https://www.iisd.org/articles/deep-dive/land-degradation-land-restoration>.
- FAO Food Agriculture Organization. 2015. Climate Change And Food Security: Risks And Responses. [Internet] (Cited 2023 Jan 8] Tersedia dari: <https://www.fao.org/3/I5188e/I5188E.pdf> [FAO] Food Agriculture Organization. 2017. The future of food and agriculture. Trend and challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome [Internet]. [cited 2021 May 23]. Tersedia dari: www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
- Tono, Mewa Ariani, Achmad Suryan. 2023. Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian Dengan Kriteria Global Dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 21 No. 1, Juni 2023: 1-20 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>